

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi serta taraf hidup penduduknya. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk memperbaiki seluruh aspek dalam kehidupan demi terciptanya kesejahteraan pada masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat ditunjukkan dengan meningkatnya GNP atau GDP suatu negara. Perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat dapat tercermin pada kenaikan pendapatan per kapita, maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses menaikkan pendapatan perkapita.

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, sudah seharusnya titik sentral dalam pembangunan dialihkan tingkat pedesaan, karena mayoritas penduduk Indonesia tersebar di pedesaan dan perputaran ekonomi suatu negara juga berawal dari desa (Wahed, 2020). Daerah pedesaan masih jauh tertinggal dari daerah perkotaan. Desa dari segi pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dan fasilitas-fasilitas lain masih jauh perbedaannya dibanding kota. Pembangunan desa sudah dilakukan pemerintah melalui berbagai program, akan tetapi belum memberikan hasil yang signifikan. Pembangunan ekonomi di daerah pedesaan sangat penting dalam upaya pembangunan nasional dan pembangunan daerah agar hasilnya bisa langsung menyentuh masyarakat karena sebagian besar masyarakat bermukim di desa (Salihin, 2021)

Pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara memberdayakan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat desa, karena daerah pedesaan berperan penting dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Maka dari itu pembangunan ekonomi dengan cara pemberdayaan serta pengembangan ekonomi akan memberikan dampak yang baik dan juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pedesaan mempunyai banyak potensi seperti jumlah penduduk serta melimpahnya sumber daya alam dan apabila kedua hal tersebut dikelola secara maksimal maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya pembangunan desa masih mempunyai banyak kelemahan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kemampuan keuangan yang tergolong kecil.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membentuk program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program BUMDes bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan kreativitas masyarakat desa. Lembaga ini diatur dalam UU Pasal 1 Ayat 6 Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 yang menjelaskan mengenai keberadaan BUMDes yang ternyata belum bisa dilaksanakan oleh seluruh desa, penyebab kondisi saat ini dipengaruhi oleh masalah klasik dimana kualitas sumberdaya manusia yang kurang sehingga pemerintah desa tidak mampu mengelola potensi desa dengan maksimal.

Setelah UU No. 26 Tahun 2014 tentang desa diterbitkan, pengalokasian 10% dari dan APBD yang diambil oleh desa digunakan untuk pembangunan desa. Bagi suatu desa dana tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, maka dari itu desa harus

mengelola dengan baik dana tersebut. Dalam amanat Permendes disebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan dana yang diberikan begitu besar maka setiap desa harus melakukan pembangunan desa, terutama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dana tersebut juga harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi *win solution* bagi masyarakat desa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan desa yaitu dengan memberikan pemerintah desa kewenangan penuh dalam mengelola desa secara mandiri melalui lembaga ekonomi yang ada di desa. Salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes didasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan menetapkan pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Tujuan pembentukan BUMDes tentunya untuk memperkuat ekonomi desa dan berfungsi sebagai lembaga komersial untuk menawarkan sumberdaya lokal dan mencari keuntungan (Salihin, 2021).

BUMDes diharapkan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan perekonomian di kawasan pedesaan. Seluruh aset ekonomi yang dimiliki oleh desa harus dikelola oleh masyarakat desa secara maksimal. Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan semangat kebersamaan demi memperkuat aspek ekonomi. BUMDes sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru pada pengembangan ekonomi di Indonesia. Peran BUMDes dapat diperbaiki, tidak hanya sebagai mediator dana pemerintah namun juga sebagai fasilitator dalam mendorong aktivitas ekonomi di pedesaan yang menghasilkan nilai tambah.



Gambar 1.1 Jumlah BUMDesa dan BUMDes Bersama Indonesia Tahun 2014-2022

Sumber: Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pendirian BUMDes yang dilakukan di Indonesia begitu gencar, dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa pada tahun 2022 lebih dari 60.000 desa telah memiliki BUMDes, namun sebanyak 35% dari total BUMDes tidak aktif. Menurut data perkembangan BUMDes di Indonesia pada tahun 2022, dari 45.233 BUMDes yang aktif menjalankan usaha, telah membuka lapangan pekerjaan sebanyak 20.369.834 orang dan memiliki omzet sebesar Rp. 4,6 triliun. Sebanyak 7.902 BUMDes juga telah memiliki sertifikat badan hukum usaha. Kontribusi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) juga signifikan sebagai salah satu sumber pendapatan APBDes yaitu sebesar Rp. 1,1 triliun pada tahun 2017-2021 (Yulianto, 2023).

Jumlah desa yang memiliki BUMDes di Provinsi Jawa Timur sebanyak 6.490 desa. Klasifikasi BUMDes di Jawa Timur terdiri dari 1.400 BUMDes maju, 2.353 BUMDes berkembang, dan 2.737 BUMDes pemula. Jumlah BUMDes maju naik signifikan setiap tahun. Sementara itu, di Kabupaten Bangkalan menurut data survey seluruh desa telah memiliki BUMDes yaitu 273 desa. Namun, dari

keseluruhan BUMDes di Kabupaten Bangkalan belum terdapat BUMDes dengan kategori maju. Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Bangkalan terdiri dari 249 BUMDes berkembang dan 24 BUMDes pemula.

BUMDes di Kabupaten Bangkalan rata-rata dibentuk pada tahun 2016 dan 2017, hanya ada satu BUMDes yang didirikan pada tahun 2018 yaitu BUMDes Sempurna di Desa Kamal. Hampir semua jenis usaha BUMDes di seluruh desa Kabupaten Bangkalan yaitu peternakan, ada beberapa desa yang berlokasi di pesisir mempunyai usaha di bidang pariwisata dan ada juga beberapa yang mempunyai usaha di bidang jasa.

Analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan metode analisis regresi logistik biner. Regresi logistik biner adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kemungkinan atau probabilitas perkembangan BUMDes. Dalam analisis ini, variabel respon adalah perkembangan BUMDes, yang dijadikan variabel biner dengan nilai 1 jika BUMDes dikategorikan berkembang dan nilai 0 jika BUMDes dikategorikan pemula. Sedangkan, variabel prediktor yang digunakan dalam analisis ini adalah jenis topografi desa, jenis komoditi/sub sektor utama desa, keberadaan produk unggulan desa, jumlah SKTM yang dikeluarkan desa, jumlah usaha mikro dan kecil desa, serta keberadaan pendamping lokal desa.

Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi apakah variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh dalam perkembangan BUMDes di Kabupaten Bangkalan tergolong berkembang dan pemula dengan menggunakan analisis regresi logistik biner. Lokasi penelitian ini dilakukan pada

seluruh BUMDes yang ada di Desa-Desa Kabupaten Bangkalan. Penentuan lokasi pada penelitian karena di Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh BUMDes. Namun, secara realita perkembangan BUMDes di Kabupaten Bangkalan masih tergolong lambat, dengan dibuktikan belum adanya kategori maju pada BUMDes.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut merupakan rumusan masalah yang dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah variabel topografi desa, komoditi/sub sektor utama desa, keberadaan produk unggulan desa, jumlah SKTM yang dikeluarkan desa, jumlah usaha mikro dan kecil desa, dan keberadaan pendamping lokal desa berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes di Kabupaten Bangkalan?
2. Seberapa besar pengaruh masing-masing variabel yang signifikan terhadap perkembangan BUMDes di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan memberikan pemahaman penyebab BUMDes di Kabupaten Bangkalan yang masih berstatus berkembang maupun pemula jika terdapat variabel prediktor yang signifikan dalam proses analisis.
2. Untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap perkembangan BUMDes di Kabupaten Bangkalan kemudian dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan BUMDes.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang keilmuan khususnya pada pengembangan ekonomi lokal bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura mengenai pengaruh jenis topografi desa, komoditi atau sub sektor utama desa, keberadaan produk unggulan desa, jumlah SKTM yang dikeluarkan desa, jumlah usaha mikro dan kecil desa, serta keberadaan pendamping lokal desa terhadap perkembangan BUMDes khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai perekonomian indonesia terutama yang berhubungan dengan mengenai perkembangan BUMDes, jenis topografi desa, komoditi atau sub sektor utama desa, keberadaan produk unggulan desa, SKTM yang dikeluarkan desa, usaha mikro dan kecil desa, serta keberadaan pendamping lokal desa. serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain yang meneliti masalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BUMDes dimasa yang akan datang secara lebih efektif dan efisien.